

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Peran sektor bisnis berkembang pesat di berbagai negara berkembang seperti di Indonesia. Banyaknya UMKM yang bermunculan sebagai bukti dari situasi ini (Putri Tasya, 2023). Kompetisi bisnis yang dihadapi para pelaku bisnis sangatlah tinggi dikarenakan perekonomian yang tidak menentu akibat pasar global, peran UMKM sendiri tidak dipungkiri keberadaannya sangat penting dalam membangun perekonomian khususnya di Indonesia (Dwi Astuti & Soleha, 2023). Kala Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 2020 lalu sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang membuat sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mencapai target-target bisnisnya, praktis perekonomian Indonesia juga menjadi terganggu atau merosot dan seiring pandemi dilonggarkan dan UMKM mulai menggeliat maka mulai terlihat perekonomian Indonesia secara perlahan juga sudah mulai bangkit (Melati Wely Putri, 2022).

Kondisi serupa terlihat pula pada UMKM di Provinsi Bali, sektor UMKM Provinsi Bali pada masa panca pandemi kembali membuktikan perannya dalam menjaga dan bahkan mengurangi tingkat pengangguran di Bali. Ketika pariwisata Bali mengalami keterpurukan, banyak masyarakat mengalihkan perhatiannya ke sektor UMKM dengan merintis sebuah usaha, dan kini pelaku UMKM menjadi sektor harapan dalam pemulihan ekonomi Bali (Widi & Sinarwati, 2023). Data Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali memperlihatkan ketika terjadinya penyebaran wabah covid-19 jumlah UMKM di Provinsi Bali pada tabel 1.1 justru menunjukkan

peningkatan dari 327,353 ditahun 2019 meningkat menjadi sebesar 412.265 atau 25,94% ditahun 2020 dan kembali meningkat sebesar 440,609 atau 6,88% ditahun 2021, terakhir baru mengalami penurunan menjadi 439.382 atau -0,28% ditahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Tahun	Formal	Informal	Jumlah	%
2019	82.214	245.139	327,353	
2020	75.664	336.601	412.265	25,94%
2021	98.567	342.166	440,609	6,88%
2022	107.656	295,934	439.382	(0,28%)

Sumber: Diskopukm Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Sesuai data yang ada pada tabel 1.2, diketahui pula Kabupaten Buleleng ikut menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pertumbuhan jumlah UMKM yang cukup pesat. Mulai tahun 2020-2022 tampak jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng cukup konsisten mengalami peningkatan, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 54.489 UMKM atau sebesar 58,52%, kemudian meningkat kembali ditahun 2021 menjadi 57.216 UMKM atau meningkat sebesar 5,00% dan terakhir ditahun 2022 kembali meningkat secara signifikan menjadi 66.368 UMKM atau sebesar 16,00%. Peningkatan tersebut disebabkan, pelaku UMKM banyak yang mulai muncul baik itu yang bergerak di usaha mikro maupun UMKM lainnya. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian saat pandemi terjadi, sebagian besar beralih dengan membuat sebuah usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan terpenuhinya kebutuhannya maka usaha UMKM yang dilakukan bisa dikatakan berjalan dengan baik

Tabel 1. 2
Perkembangan UMKM per Kabupaten Provinsi Bali

Kabupaten	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Buleleng	34.374	-	54.489	58,52	57.216	5,00	66.368	16,00
Badung	19.261	-	22.647	17,58	40.989	80,99	21.699	-47,06
Bangli	44.086	-	44.123	0,12	44.175	0,12	44.251	0,17
Denpasar	32.026	-	32.224	0,62	32.226	0,01	29.749	-7,69
Gianyar	75.482	-	75.542	0,08	75.620	0,10	75.666	0,06
Jembrana	24.346	-	46.277	90,08	66.537	43,78	67.183	0,97
Karangasem	40.468	-	57.456	41,98	40.614	-29,31	50.717	24,88
Klungkung	14.584	-	35.792	145,42	36.072	0,78	35.792	-0,78
Tabanan	42.744	-	43.715	2,27	47.160	7,88	47.957	1,69

Sumber: Diskopukm Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tercatat cukup konsisten, hanya saja dari sisi sektor UMKM yang formal dan informal mengalami ketimpangan selama kurun waktu observasi yaitu dari 2019-2022 pada tabel 1.3, dimana persentase pelaku UMKM yang formal selalu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan UMKM informal. Seperti ditahun terakhir atau tepatnya ditahun 2022 nilai persentase UMKM formal hanya sebesar 26,68 persen dan UMKM informal sebesar 73,32 persen dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3
Perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng

Tahun	Data UMKM Kabupaten Buleleng			
	Formal	%	Informal	%
2019	8.913	25,93%	25.461	74,07%
2020	9.598	17,61%	44.891	82,39%
2021	10.872	19,00%	46.344	81,00%
2022	17.707	26,68%	48.661	73,32%

Sumber: Diskopukm Provinsi Bali Tahun 2019-2022

Sebagaimana diketahui UMKM formal merupakan suatu usaha yang memiliki izin usaha dari pemerintah serta mendapatkan jaminan hukum untuk mendapat perlindungan usaha sedangkan usaha informal merupakan suatu usaha kurang menerima perlindungan dari pemerintah, namun terbatas dalam ruang lingkup kegiatannya (Hendro dkk., 2021). Jumlah pelaku UMKM informal yang

cukup mendominasi bila dibandingkan dengan pelaku UMKM formal, menunjukkan bahwa secara garis besar pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih memiliki masalah khususnya pada pengelolaan keuangannya yaitu belum menggunakan sistem sesuai dengan standar mengelola keuangan yang baik dan benar serta belum mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Sesuai dengan data Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng, ditahun 2023 tercatat hanya 183 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori proaktif yang memiliki catatan keuangan baik dan memiliki kontribusi tinggi pada perekonomian di Kabupaten Buleleng diantaranya dari sektor kuliner sebanyak 104 atau 56,83 persen, sektor kria sebanyak 57 atau 31,15 persen, dan sektor fashion sebanyak 22 atau 12,02 persen dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1. 4
UMKM Proaktif Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Sektor UMKM	Jumlah	Persentase
1	Kuliner	104	56,83%
2	Krya	57	31,15%
3	Fashion	22	12,02%

Sumber: Dinas Perdagangan, Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan yang rendah tentunya akan berdampak buruk bagi keuangan UMKM, sebab pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi perkembangan usaha dan ini tidak boleh diabaikan oleh setiap pelaku UMKM terutama yang berkaitan dengan penerapan pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar (Rumbianingrus, W., & Wijayangka. C., 2018). Pengelolaan keuangan dimaksud merupakan aktifitas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangan yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan finansial (Arianti, B. F., 2018). Di Kabupaten Buleleng masih banyak UMKM yang

belum mengetahui pengelolaan keuangan dengan benar, hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng memang benar para pelaku UMKM tersebut belum bisa mengelola keuangannya dengan baik, mereka juga tidak memiliki catatan keuangan yang tersusun rapi sering kali mereka masih mencatat keuangannya secara manual tidak menggunakan sistem, tidak hanya itu ada juga para pelaku UMKM yang memang tidak memiliki catatan keuangan, mereka hanya mengira-ngira pendapatan, pengeluaran, dan biaya operasional yang digunakan.

Adanya permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Buleleng. Pelatihan yang diselenggarakan berkaitan dengan strategi-strategi khusus tentang keuangan, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, akses permodalan, dan strategi UMKM *global*. *Output* yang dikehendaki yakni pelaku UMKM Kabupaten Buleleng mampu bersaing dan mampu mengaplikasikan aplikasi pengelolaan keuangan tersebut (Nusabali.com, 2022). Seseorang yang mempunyai pengetahuan pengelolaan keuangan yang luas, maka akan cenderung memiliki keterampilan dalam mengatur keuangan usahanya. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memikirkan secara matang cara mengelola keuangannya dengan benar. Hal tersebut didorong oleh literasi keuangan supaya para pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik (Amelia, 2022). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Kusumaningrum, dkk., 2023) bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan

sikap keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, dimana pengetahuan tersebut mencakup tabungan, investasi, hutang, asuransi serta perangkat keuangan lainnya serta sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan guna mencapai kesejahteraan, (Arianti, B. F., 2018). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki para pelaku UMKM maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan UMKM tersebut (Prihatin & Maruf, 2019). Berdasarkan data pada tabel 1.3 dan hasil wawancara peneliti dengan 10 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, banyaknya pelaku-pelaku UMKM yang berada pada sektor informal, dimana kategori dari sektor informal itu dalam pencatatan keuangannya belum tertata dengan baik, hal itu terindikasi adanya campuran antara uang pribadi dengan uang usaha (Budiasni Novi, 2022). Maka dari itu, penting sekali untuk UMKM memiliki pengetahuan yang baik mengenai literasi keuangan yang akan memudahkan mereka dalam mengelola usaha, mulai dari mengatur anggaran, perencanaan kebutuhan, hingga pencatatan akuntansi (Amelia, 2022).

Selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM dari (Putri, dkk., 2023), menemukan hasil bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Senada dengan hasil tersebut (Amelia, 2022), yang juga melakukan riset mendapati hasil sama yakni literasi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM. Begitu juga penelitian dari (Kudo Shintia, 2023) yang juga mendapat adanya

pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Dengan hasil riset yang sudah pernah dilangsungkan maka dapat disimpulkan bahwa memang benar literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan para pelaku usaha UMKM, karena mempunyai pengetahuan literasi keuangan yang tinggi maka mereka memiliki kemampuan serta percaya diri untuk mengelola keuangan pribadi maupun usahanya dengan tepat, baik perencanaan keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang serta sadar terhadap kondisi serta keberlanjutan usahanya (Arianti, B. F., 2018). Akan tetapi studi (Safitri, dkk., 2023) dan (Sari, N. R., & Listiadi, A., 2021), mendapati hasil yang kontradiktif dimana hasil temuannya memperoleh hasil bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Selanjutnya yang mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM adalah inklusi keuangan (Sisilian Maharani, 2022). Inklusi keuangan merupakan kondisi dimana setiap masyarakat memiliki akses yang lancar terhadap pemanfaatan berbagai produk dan layanan keuangan perbankan yang berkualitas tinggi pada waktu yang tepat dan dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraannya maupu usaha yang dijalankan (Anisyah Eka, 2021). Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait produk serta jasa dari sektor keuangan juga menjadi bagian penting dalam menyikapi keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih optimal (Bonang Dahlia, 2019).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan (SNIK) tahun 2019 menyatakan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki indeks inklusi keuangan yang masih rendah, yaitu 68,3% dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali seperti contohnya di Kota Denpasar memiliki indeks inklusi keuangan yang cukup tinggi sebesar 84,2%, dalam hal ini Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara memaksimalkan uangnya (Sisilia Maharani, 2022).

Pemaparan diatas menunjukkan Kabupaten Buleleng memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah, akibat kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan produk-produk perbankan, terlihat pelaku UMKM masih banyak yang kekurangan modal dalam mendukung keberlangsungan usahanya (Septiani, R., 2020). Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, memang benar minimnya pengetahuan yang dimiliki para pelaku UMKM mengenai produk-produk perbankan, bahkan ada dari mereka yang sama sekali belum pernah meminjam modal ke bank dikarenakan mereka tidak mengetahui prosedur peminjaman uang di bank.

Ketika pelaku usaha mengalami kekurangan dana, diharapkan mampu memanfaatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan (Widi & Sinarwati, 2023). Penelusuran variabel inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang diteliti oleh (Dwi Astuti & Soleha, 2023), (Islami, 2022), dalam penelitiannya menyatakan inklusi keuangan memperoleh hasil signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Namun pada penelitian (Kusumaningrum, dkk., 2023) melalui risetnya memperoleh hasil berbeda, bahwa inklusi keuangan tidak mempengaruhi

pengelolaan keuangan UMKM. Begitu pula dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Anisyah, dkk., 2021) mengemukakan kalau inklusi keuangan tidak memengaruhi perilaku keuangan UMKM.

Terakhir sikap keuangan juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM, karena dengan adanya sikap keuangan yang baik dan benar sehingga keputusan keuangan yang diambil akan tepat (Kusumaningrum, dkk., 2023). Sikap keuangan adalah suatu perilaku seseorang terhadap uang yang dimiliki (Safitri, dkk., 2023). Sikap keuangan juga merupakan pandangan seseorang terhadap kemampuan mengontrol diri terhadap pengeluaran keuangan, membuat rencana keuangan dan membuat anggaran serta tindakan dalam mengambil keputusan keuangan yang benar.

Para pelaku UMKM memiliki sikap keuangan yang buruk ditandai dengan pemikiran yang mudah merasa puas dengan hasil yang didapatkan dan belum berfikir untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang manajemen keuangan karena sebagian pelaku usaha merasa hasil yang didapat sudah cukup baik dan usahanya tetap berjalan dengan lancar dan tanpa kendala meskipun pelaku UMKM tidak membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan. Seseorang yang besikap rasional dan lebih percaya diri dalam konteks pengetahuan keuangan yang mempengaruhi perilaku keuangan yang jauh lebih menguntungkan (Putri, R., 2022).

Sikap keuangan tentunya dapat memunculkan keserakahan terlebih jika digunakan secara sembarangan. Sikap keuangan dapat mempengaruhi suatu kondisi keuangan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apabila seseorang

kurang mampu mengambil sikap dan melakukan kesalahan dalam perencanaannya maka akan menciptakan efek yang dalam jangka yang cukup panjang (Islamia, dkk., 2022). Seperti halnya pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan akses KUR kepada pelaku usaha UMKM, dari 34,552 UMKM yang ada tercatat sudah 19.000 UMKM yang memanfaatkan akses KUR sebagai permodalan untuk mendukung berjalannya usaha yang dijalankan oleh UMKM (Sudiarta Dewa, 2019). Namun, banyak pelaku usaha yang tidak mengelola usahanya dengan baik mereka sering kali menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan pribadinya, hal ini akan merugikan UMKM itu sendiri dan juga pihak pemerintah akan ikut dirugikan atas sikap keuangan UMKM tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 10 UMKM di Kabupaten Buleleng mereka masih memiliki kebiasaan yang buruk, tidak memikirkan bagaimana caranya mengelola keuangan, seperti halnya ketika pelaku usaha mendapatkan hasil usaha dan langsung dipakai untuk memenuhi keinginannya yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha yang dijalankan, dari hal tersebut akan menyebabkan modal menjadi berkurang dan usaha yang dijalankan menjadi terhambat. Sehingga pelaku UMKM harus memiliki sikap keuangan yang baik agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan yang dapat merugikan pertumbuhan usaha. Maka dari itu, pelaku UKMM harus mengetahui antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha dalam mengelola keuangannya.

Kondisi tersebut didukung oleh penelitian terdahulu (Safitri, dkk., 2023), (Handayani, M.A., Amalia, C. Sari, T.D.R., 2022) dan (Setiawan Agus, 2022) yang mengatakan bahwa sikap keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Akan tetapi berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Agus Dwi Cahya, dkk., 2021) dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa sikap keuangan pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Mengacu pada pemaparan diatas, riset mengenai pengelolaan keuangan UMKM sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih sedikit yang menggunakan variabel inklusi dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM, dan dari variabel diatas terdapat beberapa Gap yang terjadi pada penelitian terdahulu tersebut. Penulis melihat adanya peluang riset untuk meneliti kondisi para UMKM dengan menggunakan variabel literasi keuangan, inklusi keuangan dan sikap keuangan. Sehingga, penulis tertarik untuk menjadikan variabel tersebut sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana variabel diatas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM melalui penyebaran kuisisioner dengan google form terhadap UMKM Proaktif di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga dapat mendukung program pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Dengan mengangkat judul: “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Proaktif di Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut.

1. Jumlah UMKM formal masih sangat rendah sekali dibandingkan dengan UMKM informal, dimana UMKM informal catatan keuangannya tidak

mengikuti kaidah-kaidah dalam pembuatan laporan keuangan hanya bersifat ingatan.

2. Pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki literasi yang rendah, dikarenakan pelaku UMKM yang sering mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha tanpa memperhitungkan modal dan biaya-biaya lainnya.
3. Pemahaman inklusi keuangan yang rendah pada Kabupaten Buleleng, ditunjukkan pada kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan produk-produk perbankan, terlihat pelaku UMKM masih banyak UMKM yang memiliki kekurangan modal dalam mendukung keberlangsungan usahanya.
4. Adanya sikap keuangan yang rendah pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, ketika pelaku usaha mendatangkan hasil usaha mereka langsung menggunakannya untuk memenuhi keinginannya yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha yang dijalankan, maka akan menyebabkan modal menjadi berkurang dan usaha yang dijalankan menjadi terhambat.

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi untuk mengetahui literasi keuangan, inklusi keuangan, dan sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah ada pengaruh inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah ada literasi keuangan, inklusi keuangan dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Pengaruh inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
4. Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat dijadikan sebagai referensi berikutnya mengenai pengelolaan keuangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dirapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam pengambilan suatu keputusan yang baik untuk pengelolaan keuangan dari pelaku usaha itu sendiri dan mampu mengelolan keuangan dengan baik dan bijak.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan menambah wawasan khususnya mengenai bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber pustaka khususnya mengenai pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng.